PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PEMERINTAH TERHADAP ANAK BINAAN DI DALAM LPKA DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK

Rizqan Syahru Ramadhan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Andi Talitha Miranda Imasti
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Aditya Choerin Nazili
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Wido Cepaka Warih
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Studies
2025, Vol. 02 No. 01
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

E-ISSN
3032-6125

Abstract

Every child has the right to education. Education is able to unlock the potential of a child to become a quality individual. This research aims to find out how the implementation of the compulsory education policy implemented by the Indonesian government for foster children in LPKA is in accordance with the principles of the Convention on the Rights of the Child and what the impact of the compulsory education policy is on foster children. This research uses normative legal methods with secondary data sources in the form of international legal rules collected by means of literature study and analyzed qualitatively. The results show that the compulsory education policy has been implemented in most LPKA in Indonesia by cooperating with public school partners outside LPKA.

Keywords :

Compulsory Education; Foster Children; Convention on the Rights of the Child

Abstrak

Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan mampu membuka potensi dari seorang anak untuk menjadi individu yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap anak binaan di LPKA sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak dan apa dampak dari kebijakan wajib belajar tersebut terhadap anak binaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan sumber data sekunder berupa aturan hukum internasional yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan wajib belajar telah terlaksana pada sebagian besar LPKA di Indonesia dengan menggandeng mitra sekolah negeri di luar LPKA.

Kata kunci :

Wajib Belajar; Anak Binaan; Konvensi Hak Anak

Pendahuluan

Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989 telah menjadi landasan prinsip bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia. Di dalamnya tercantum berbagai hak fundamental anak, termasuk hak atas pendidikan yang berkualitas, perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk hidup dalam keluarga yang penuh cinta dan perhatian. Namun, anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) seringkali merupakan kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mereka mungkin telah terlibat dalam pelanggaran hukum atau terjebak dalam situasi yang sulit, yang membuat mereka lebih membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah pada anak-anak binaan di LPKA memenuhi standar Konvensi ini, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan anak-anak (Saputra, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah hak anak dan peradilan pidana telah menjadi perhatian utama dalam diskursus sosial dan politik. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak dan peran penting Konvensi Hak Anak, pemerintah dan masyarakat semakin fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak fundamental anak-anak, termasuk hak atas pendidikan. Sementara itu, anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) merupakan kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mereka seringkali telah melanggar hukum dan, oleh karena itu, berada dalam situasi yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, penerapan kebijakan wajib belajar di dalam LPKA menjadi sangat

penting. Hal ini melibatkan upaya untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak ini, sekaligus memastikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang menetapkan hak atas pendidikan yang bermutu, yang melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran, dan yang menghormati hak anak untuk berkembang secara penuh (Indrawan & Aji, 2019).

Persmasalahan yang terjadi dalam berbagai kajian bahwa anak-anak ini telah melanggar hukum dan berada dalam sistem peradilan pidana. Mereka ditempatkan di LPKA sebagai tindakan korektif, dengan tujuan memfasilitasi rehabilitasi mereka. Namun, dalam konteks ini, terdapat masalah signifikan yang perlu diatasi. Pertama, akses mereka terhadap pendidikan seringkali terbatas, dan kualitas pendidikan yang mereka terima belum tentu memenuhi standar yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan mereka. Fasilitas pendidikan, pengajaran, dan sumber daya mungkin terbatas di dalam LPKA, sehingga anak-anak ini mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, aspek hak-hak anak juga menjadi fokus penting dalam konteks ini. Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh pemerintah, menegaskan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali sejauh mana kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah di dalam LPKA sesuai dengan komitmen ini. Tantangan selanjutnya adalah bahwa anak-anak ini juga memerlukan perhatian khusus terkait perkembangan sosial dan psikologis mereka. Mereka mungkin menghadapi stigmatisasi, isolasi, dan pengalaman traumatis sebagai akibat dari kegiatan

kriminal yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar harus mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam upaya untuk mendukung perkembangan yang sehat dan reintegrasi sosial mereka setelah dibebaskan (Muafi & Thohir, 2020).

Penelitian ini juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap masa depan anak-anak yang kemungkinan besar akan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa tahanan. Dengan demikian, artikel ini menjadi relevan dalam rangka mencari solusi yang efektif untuk mengurangi tingkat kriminalitas anak di masa depan dan memberikan peluang yang lebih baik bagi mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Selain itu, artikel ini juga penting dalam konteks pemantauan dan evaluasi kebijakan publik, karena akan memberikan wawasan yang berharga tentang sejauh mana pemerintah menghormati dan melindungi hak-hak anak di LPKA, serta apakah ada peningkatan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kesimpulannya, latar belakang ini menggarisbawahi urgensi penelitian ini dalam mengeksplorasi dampak dan kesesuaian kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan dengan Konvensi Hak Anak, yang pada akhirnya akan memengaruhi masa depan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

Metode

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka digunakan sebagai landasan dalam kajian artikel "Penerapan Kebijakan Wajib Belajar Pemerintah terhadap Anak Binaan di dalam LPKA Ditinjau dari Konvensi Hak Anak." Dalam metode ini, peneliti akan menggali literatur dan sumber-sumber

terkait, termasuk laporan penelitian, kebijakan pemerintah, studi kasus, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik tersebut. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam teori-teori, konsep, dan isu-isu yang berkaitan dengan penerapan kebijakan wajib belajar terhadap anak binaan. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif ini, analisis mendalam akan dilakukan terhadap literatur yang ditemukan. Peneliti akan mencari pola-pola, persamaan, perbedaan, dan kontradiksi dalam teori dan temuan yang relevan dengan kajian. Hal ini akan membantu dalam membentuk pemahaman yang lebih kaya dan nuansakan mengenai dampak kebijakan wajib belajar terhadap anak binaan dan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Selain itu, metode penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian yang ada dan menentukan area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Analisis literatur yang cermat akan memungkinkan peneliti untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan berpotensi untuk memberikan wawasan baru terkait dengan implementasi kebijakan wajib belajar pada anak binaan di LPKA. Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, peneliti akan mampu menggambarkan secara mendalam konsep-konsep kunci, isu-isu, dan perspektif yang relevan dengan topik ini, memungkinkan mereka untuk menyusun kerangka analisis yang kokoh dan mendalam dalam mengulas penerapan kebijakan wajib belajar pemerintah dalam konteks Konvensi Hak Anak dan memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman dan pembaruan kebijakan terkait.

Hasil

Kepatuhan terhadap Konvensi Hak Anak

Dalam konteks penerapan kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam LPKA yang ditinjau dari Konvensi Hak Anak, implementasi kepatuhan terhadap konvensi ini dapat diamati dalam beberapa bentuk krusial. Pertama, terdapat upaya serius untuk memastikan bahwa anak-anak di dalam LPKA memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas. Hal ini tercermin dalam alokasi sumber daya yang mencakup pendirian fasilitas pendidikan di dalam LPKA, pengadaan materi belajar yang relevan, serta perekrutan tenaga pendidik yang terlatih untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Selain itu, implementasi juga mencakup pemantauan ketat terhadap proses pendidikan anak-anak binaan di dalam LPKA. Pemerintah dan pihak berwenang terlibat dalam evaluasi berkala terhadap kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan, memastikan bahwa pendekatan yang diadopsi memperhatikan aspek-aspek khusus yang relevan dengan kondisi anak-anak dalam konteks penjara. Selanjutnya, ada upaya untuk mengintegrasikan aspek-aspek penting dari Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan dan praktik sehari-hari di LPKA.

Hal ini mencakup penekanan pada hak anak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, hak untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta peningkatan kualitas kehidupan anak-anak di dalam LPKA sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Konvensi. Implementasi kepatuhan terhadap Konvensi Hak Anak juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak

binaan memiliki akses yang memadai untuk layanan kesehatan, kesejahteraan, dan dukungan psikologis yang diperlukan. Ini bertujuan untuk memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bahkan dalam konteks LPKA (Wulan Sari et al., 2023).

Implementasi kepatuhan terhadap Konvensi Hak Anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), merupakan isu yang memerlukan analisis komprehensif. Dalam konteks ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang mencakup hak-hak dasar anak-anak seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Namun, implementasi praktis dari komitmen ini seringkali menghadapi tantangan.

Kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua anak, termasuk anak-anak binaan di LPKA. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di dalam LPKA, kualitas pengajaran yang bervariasi, serta tantangan dalam memenuhi hak anak-anak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan wajib belajar di dalam LPKA telah berhasil memitigasi dampak negatif dari pengalaman penahanan terhadap perkembangan anak-anak, serta apakah hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang melarang

perlakuan yang merendahkan martabat anak. Dalam mengukur efektivitasnya, perlu dianalisis apakah kebijakan tersebut telah menciptakan peluang yang lebih baik bagi anak-anak binaan untuk merehabilitasi diri, menghindari kriminalitas di masa depan, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Dalam konteks ini, penelitian perlu mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di berbagai LPKA di seluruh Indonesia, mengingat perbedaan dalam kondisi dan fasilitas di setiap LPKA.

Selain itu, aspek monitoring dan pengawasan terhadap penerapan kebijakan ini juga perlu ditinjau, untuk memastikan bahwa anak-anak binaan benar-benar mendapatkan manfaat dari upaya pemerintah dalam mematuhi Konvensi Hak Anak. Penerapan kebijakan wajib belajar oleh pemerintah terhadap anak binaan di dalam LPKA merupakan langkah yang esensial dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak. Namun, tantangan dan kendala dalam implementasi perlu diperhatikan agar dapat memastikan bahwa hak-hak anak-anak di dalam sistem peradilan pidana terlindungi dan bahwa mereka memiliki peluang yang adil untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan rehabilitasi (Kosasih, 2018).

Dampak terhadap Pendidikan dan Pengembangan Anak

Bentuk implementasi kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) memiliki dampak yang mendalam pada pendidikan dan perkembangan anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan ini pertama-tama mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di dalam LPKA. Ini mencakup ketersediaan ruang kelas, perpustakaan,

bahan ajar, serta kualifikasi pendidik yang berkompeten untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum nasional. Selain itu, metode pengajaran juga merupakan aspek penting dari implementasi kebijakan ini. Para pendidik di LPKA harus mampu menggunakan metode pembelajaran yang relevan dan efektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu anak-anak yang mungkin memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Ini melibatkan penyesuaian kurikulum dan pengajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan anak-anak binaan.

Dalam konteks perkembangan anak-anak, implementasi kebijakan wajib belajar juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sosial, emosional, dan psikologis mereka. Ini termasuk program konseling, kegiatan sosial, dan dukungan psikologis yang dirancang khusus untuk anak-anak di dalam LPKA. Lingkungan ini seharusnya memungkinkan anak-anak untuk memperoleh keterampilan sosial yang diperlukan dan mengatasi dampak psikologis dari pengalaman mereka. Selanjutnya, implementasi kebijakan ini harus memastikan bahwa hak anak-anak untuk pendidikan yang berkualitas dan pengembangan yang sesuai dihormati dan dipromosikan. Ini mencakup pemantauan terus-menerus terhadap proses pendidikan di LPKA dan evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai oleh anak-anak dalam pendidikan mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan wajib belajar harus mendukung konsep dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu melindungi dan memajukan hak-hak dasar anak-anak dalam konteks sistem peradilan pidana (Mubin, 2019).

Implementasi kebijakan wajib belajar oleh pemerintah di Indonesia

dalam konteks anak binaan di LPKA memunculkan sejumlah dampak yang signifikan pada pendidikan dan pengembangan anak-anak tersebut. Dalam segi pendidikan, kebijakan ini telah menghadirkan sejumlah perubahan positif dalam hal aksesibilitas dan kualitas pendidikan di dalam LPKA. Fasilitas pendidikan yang lebih baik dan pelibatan tenaga pendidik yang terlatih telah meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan formal, yang merupakan hak asasi mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak-anak binaan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang akan membantu mereka ketika mereka kembali ke masyarakat. Dari perspektif pengembangan anak, kebijakan wajib belajar juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi perkembangan sosial dan psikologis yang sehat. Ini karena pendidikan tidak hanya berperan sebagai proses akademik, tetapi juga sebagai alat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal anak-anak.

Anak-anak binaan yang mengikuti pendidikan memiliki peluang lebih besar untuk membangun hubungan yang positif dengan rekan-rekan sebaya mereka, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan merasa lebih siap secara psikologis untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, implementasi kebijakan wajib belajar juga dapat dilihat dalam konteks Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia, dengan menerapkan kebijakan ini, telah berusaha untuk memastikan bahwa hak anak-anak dalam hal pendidikan terlindungi dengan baik. Ini termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas tanpa diskriminasi. Dengan begitu, implementasi kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang

tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yang mengakui pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap anak. Penting untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan wajib belajar ini. Selain memberikan pendidikan dan pengembangan yang layak di dalam LPKA, tujuan utama adalah mengurangi risiko anak binaan kembali terlibat dalam tindak kriminal setelah mereka dibebaskan. Oleh karena itu, pengumpulan data yang cermat tentang tingkat kriminalitas kembali anak-anak ini setelah keluar dari LPKA adalah aspek penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ini. Implementasi kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam LPKA memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan dan pengembangan anak-anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Upaya ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi anak-anak untuk mengubah arah masa depan mereka dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan (Anggie Johar & Sartika, 2022).

Kesejahteraan Psikososial Anak

Dalam konteks penerapan kebijakan wajib belajar oleh pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang ditinjau dari perspektif Konvensi Hak Anak, implementasi kesejahteraan psikososial anak menjadi aspek sentral yang memerlukan perhatian mendalam. Aspek ini mencakup serangkaian langkah konkret yang melibatkan tim profesional di dalam LPKA untuk memastikan bahwa anak-anak binaan mendapatkan perlindungan dan perawatan yang memadai. Implementasi dimulai dengan penilaian psikososial individu anak saat

tiba di LPKA, yang mencakup identifikasi kebutuhan khusus seperti trauma, kecemasan, atau masalah psikologis lainnya. Selanjutnya, program pendidikan dan konseling psikososial yang disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan anak harus diselenggarakan. Ini mencakup penyediaan akses yang memadai terhadap tenaga pendidik yang terlatih dalam mendukung pertumbuhan psikososial anak-anak.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan psikososial, diperlukan program intervensi yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, peningkatan empati, dan pengelolaan stres. Program-program ini dirancang untuk membantu anak-anak binaan mengatasi konsekuensi traumatis dari pengalaman mereka sekaligus mempromosikan perkembangan psikologis yang sehat. Pentingnya pengawasan yang teliti dalam implementasi kebijakan wajib belajar juga mencakup pemantauan perkembangan psikososial anak secara berkala. Tim profesional di LPKA harus secara rutin menilai dampak kebijakan ini pada kesejahteraan psikososial anak-anak.

Evaluasi tersebut melibatkan kerja sama antara staf pendidikan, tenaga kesehatan, dan psikolog yang bekerja sama untuk mengidentifikasi perubahan positif atau masalah yang mungkin muncul. Kebijakan ini juga harus mempromosikan interaksi sosial positif di antara anak-anak binaan. Keterlibatan dalam kegiatan kelompok, termasuk kegiatan seni, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Dengan cara ini, implementasi kebijakan wajib belajar harus memberikan kesempatan bagi

anak-anak untuk membangun koneksi positif dengan teman sebaya dan staf LPKA, seiring dengan peningkatan kesejahteraan psikososial mereka. Dalam rangka mencapai tujuan Konvensi Hak Anak dan melindungi hak-hak anak di LPKA, penerapan kebijakan wajib belajar harus memprioritaskan kesejahteraan psikososial anak-anak sebagai elemen sentral, dan harus dilakukan dengan teliti dan berkelanjutan untuk memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan psikologis dan sosial yang positif (Wijaya et al., 2020).

Dalam konteks implementasi Kesejahteraan Psikososial Anak di Indonesia, sehubungan dengan penerapan kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang ditinjau dari Konvensi Hak Anak, beberapa aspek penting muncul. Pertama, penting untuk menyoroti upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai di dalam LPKA. Hal ini mencakup kualitas ruang kelas, buku pelajaran, peralatan pembelajaran, dan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualifikasi.

Selain itu, aspek kedua yang relevan adalah penerapan metode pengajaran yang berfokus pada pembinaan psikososial anak-anak. Ini mencakup penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan perkembangan psikologis anak, penyediaan layanan konseling, serta pelibatan psikolog dan konselor yang dapat memberikan dukungan emosional kepada anak-anak selama masa tahanan. Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah integrasi sosial anak-anak di dalam LPKA. Kesejahteraan psikososial tidak hanya tergantung pada aspek pendidikan, tetapi juga pada hubungan interpersonal

yang sehat antara anak-anak, staf LPKA, dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, peran pendamping sosial dan program rehabilitasi sosial perlu diperkuat. Terakhir, implementasi efektif dari kebijakan wajib belajar harus mencakup upaya yang konkret untuk memonitor dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan psikososial anak di LPKA. Ini melibatkan pengumpulan data terkait kesejahteraan psikososial, termasuk indikator kesejahteraan mental, tingkat kebahagiaan, dan interaksi sosial anak-anak.

Evaluasi yang berkelanjutan akan membantu pemerintah menyesuaikan kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan sebenarnya anak-anak binaan, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Dalam rangka mencapai kesejahteraan psikososial yang optimal bagi anak-anak di dalam LPKA, penting untuk memperhatikan implementasi dan pengawasan ketat terhadap penerapan kebijakan wajib belajar ini. Hal ini akan memastikan bahwa anak-anak binaan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan psikososial yang sehat (Aini, 2019).

Pembahasan

Implementasi kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia adalah sebuah proses yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktiknya, kebijakan ini melibatkan sejumlah aspek kunci yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan di dalam LPKA, rekrutmen dan pelatihan staf pengajar yang berkualitas, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak-anak di dalam lingkungan ini. Selain itu, kebijakan wajib belajar juga mengatur prosedur pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas. Implementasi ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan di dalam sistem peradilan pidana dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Upaya ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam konteks judul artikel ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan wajib belajar di LPKA di Indonesia diimplementasikan, serta sejauh mana implementasi ini mematuhi standar yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak. Dengan memahami detail-detail dari implementasi ini, kita dapat mengevaluasi dampaknya terhadap hak-hak, perkembangan, dan masa depan anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, serta melihat apakah kebijakan ini telah mencapai tujuan perlindungan dan pemajuan hak anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak.

Kebijakan wajib belajar yang diterapkan oleh pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia mengambil berbagai bentuk yang mencerminkan upaya serius untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Pertama, pemerintah telah memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang

memadai di dalam LPKA. Ini mencakup ruang kelas, perpustakaan, dan sarana pendukung pembelajaran yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga telah mengadopsi kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tingkat usia dan tingkat pendidikan anak-anak di LPKA. Ini mencakup pembelajaran akademik dan keterampilan kehidupan sehari-hari yang akan membantu mereka ketika kembali ke masyarakat.

Program pendidikan ini dirancang untuk memberikan peluang yang setara bagi semua anak binaan, tanpa memandang latar belakang sosial atau kriminal mereka. Kebijakan wajib belajar ini juga mencakup pelibatan tenaga pendidik yang terlatih dan berpengalaman. Guru-guru yang bekerja di dalam LPKA diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan kebutuhan khusus anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Mereka bertugas tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor dan pendukung bagi perkembangan anak-anak. Selanjutnya, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak-anak binaan di LPKA memiliki akses ke sarana pendukung pendidikan, seperti buku teks, materi pembelajaran yang relevan, dan peralatan sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar dengan efektif dan mencapai potensi mereka.

Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, pemerintah juga mendorong partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Ini mencakup dialog aktif dengan para anak binaan, memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dan melibatkan mereka dalam merancang program pendidikan yang

lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Secara keseluruhan, kebijakan wajib belajar pemerintah terhadap anak binaan di dalam LPKA di Indonesia mencerminkan komitmen untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak, sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Ini mencakup ketersediaan fasilitas, kurikulum yang sesuai, tenaga pendidik yang berkualitas, akses ke sarana pendukung, dan partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan pendidikan. Semua langkah ini merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak di dalam LPKA (Wulan & Sasmita, 2021).

Kesimpulan

Dalam kesimpulan dari artikel berjudul "Penerapan Kebijakan Wajib Belajar Pemerintah terhadap Anak Binaan di dalam LPKA Ditinjau dari Konvensi Hak Anak," dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan wajib belajar oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada anak-anak yang berada dalam lingkungan LPKA. Berdasarkan analisis yang mendalam, ditemukan bahwa kebijakan ini secara positif memengaruhi ketersediaan akses pendidikan bagi anak-anak binaan di LPKA, mengurangi kesenjangan dalam pendidikan, dan memberikan mereka peluang yang lebih baik untuk mengembangkan keterampilan pendidikan.

Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam mempromosikan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan yang berkualitas, yang tercermin dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah yang sesuai dengan banyak pasal dalam

Konvensi ini dan telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar anak-anak yang berada di dalam sistem peradilan pidana. Namun, meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan wajib belajar ini harus terus diperkuat dalam hal pelaksanaan, fasilitas pendidikan yang memadai, dan peningkatan kualitas pendidikan yang disediakan di LPKA.

Selain itu, integrasi sosial anak-anak binaan dan perhatian terhadap kesehatan mental mereka juga perlu ditingkatkan. Kajian menyarankan perlunya evaluasi yang lebih cermat terkait efektivitas kebijakan ini dalam mencegah pengulangan tindak kriminal anak di masa depan. Pengumpulan dan analisis data jangka panjang mengenai anak-anak yang telah mengikuti program wajib belajar ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apakah kebijakan ini berhasil dalam memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengubah jalur hidup mereka setelah keluar dari LPKA. Dalam keseluruhan, penerapan kebijakan wajib belajar oleh pemerintah terhadap anak binaan di LPKA dapat dianggap sebagai langkah positif yang mendukung hak-hak anak, namun perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan Konvensi Hak Anak tercapai secara maksimal dalam konteks ini.

Implikasi

Penerapan kebijakan wajib belajar oleh pemerintah terhadap anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki implikasi yang mendalam terhadap berbagai aspek. Pertama, dari perspektif pendidikan, kebijakan ini memberikan peluang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Ini berarti mereka dapat

memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang layak di dalam LPKA, dan dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada peningkatan literasi dan kualifikasi mereka, membantu mereka menghindari kesulitan saat mereka dibebaskan. Kedua, dalam konteks Konvensi Hak Anak, penerapan kebijakan ini harus dinilai secara cermat. Ini berarti pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak, seperti hak atas pendidikan yang berkualitas, hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, dan hak atas pengembangan yang sesuai dengan usia mereka, tidak terabaikan.

Implikasi ini menciptakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dalam memastikan bahwa kebijakan wajib belajar di LPKA mematuhi standar internasional yang telah diakui. Ketiga, penerapan kebijakan wajib belajar ini juga memiliki dampak pada kualitas pengasuhan anak-anak di LPKA. Ini mencakup pelibatan tenaga pendidik dan staf LPKA dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak, tidak hanya secara akademik, tetapi juga dalam hal kesejahteraan psikologis dan emosional. Implikasi ini mencerminkan kebutuhan untuk melihat LPKA sebagai tempat rehabilitasi, bukan hanya sebagai lembaga pasyarakatan.

Terakhir, dampak jangka panjang dari kebijakan wajib belajar ini dapat terlihat dalam statistik pengulangan tindak kriminal oleh mantan anak binaan. Jika kebijakan ini berhasil memberikan anak-anak peluang yang lebih baik untuk reintegrasi sosial dan menghindari kriminalitas di masa depan, ini akan menjadi implikasi positif yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus diperhatikan secara menyeluruh dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dan perlindungan hak anak tercapai.

Referensi

- Aini, N. (2019). PENDIDIKAN ANAK-ANAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA EDUCATION OF PRISONERS' CHILDREN AT A SPECIAL COACHING INSTITUTION FOR CLASS II YOGYAKARTA. In *Jurnal Kebijakan Pendidikan* (Vol. 8).
- Anggie Johar, O., & Sartika, D. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TERHADAP NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2).
- Kosasih, E. (2018). Partisipatory Action Research (Par) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Serang. *JIPAGS*, 2, 323–347.
<https://khamdanguru.wordpress.com/2012>
- Muafi, M., & Thohir, B. (2020). Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Kegiatan Dakwah untuk Memperbaiki Diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lumajang. *DAKWATUNA Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 6(2).
- Mubin, F. (2019). PERENCANAAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(1).
- Saputra, C. S. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020. *DINAMIKA*, 27(17).
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya->
- Wijaya, F., Program, K., Pemasarakatan, S. M., Ilmu, P., & Abstrak, P. (2020). DEKLARASI UNIVERSAL HUMAN RIGHT DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI NARAPIDANA. 7(4).
<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i3>
- Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. In *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 1, Issue 1).
- Wulan Sari, D., Khoiri, Q., Fatmawati Soekarno, N., Rade, J., Dewa, P., Selebar, K., Bengkulu, K., Kunci, K., Belajar Sembilan Tahun, W., & Raden Fattah, J. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 05(03), 9441–9450.